

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	15
C. Keaslian Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	17
E. Tujuan Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Korupsi	19
B. <i>Asset Recovery</i> (Pengembalian Aset) Dalam - Perkara Tindak Pidana Korupsi	26
C. Perbuatan Melawan Hukum	29
D. Landasan Teori	
1. Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa	57
2. <i>Civil Based Forfeiture</i> dan <i>Criminal Based Forfeiture</i>	58
3. Tujuan Hukum Pidana	59
4. Pengertian Sifat “Melawan Hukum” (<i>Wederechtelijk</i>)	59
5. Tindak Pidana Korupsi Sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” - Dalam Hukum Perdata	74

BAB III CARA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	80
B. Jenis Data	82
C. Cara Memperoleh Data	83
D. Cara Menganalisis Data	84
E. Jalannya Penelitian	85
F. Kesulitan Dalam Penelitian	85

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengembalian Aset (<i>Asset Recovery</i>) Perkara Tindak Pidana Korupsi - Melalui Tuntutan Pidana	87
1. Pengertian <i>Asset Recovery</i>	87
2. Ketentuan-Ketentuan KUHAP Dan KUHP Yang Berhubungan Dengan <i>Asset Recovery</i>	92
3. Ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berhubungan Dengan <i>Asset Recovery</i>	95
4. Ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Kepentingan <i>Asset Recovery</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	103
5. Ketentuan-Ketentuan Hukum Lainnya Yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Rangka <i>Asset Recovery</i>	105
6. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Penerapan Ketentuan- Ketentuan Hukum Pidana Untuk Kepentingan <i>Asset Recovery</i>	119
B. Pengembalian Aset (<i>Asset Recovery</i>) Perkara Tindak Pidana Korupsi - Melalui Gugatan Perdata	148
1. Penerapan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	148
2. Penerapan Pasal 38C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	165
3. Penerapan Pasal 33 Dan Pasal 34	

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	177
4. Gugatan Perdata Lainnya Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Tetapi Tidak Tercakup Dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 Dan Pasal 38C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	184
5. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Penerapan Ketentuan-Ketentuan Hukum Perdata Untuk Kepentingan <i>Asset Recovery</i>	204
C. Prospek <i>Asset Recovery</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang.	260
1. Kegiatan <i>Asset Recovery</i> Tidak Hanya Mencakup Penyitaan Dan Perampasan.	260
2. <i>Asset Recovery</i> Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset).	264
3. Prinsip-Prinsip <i>Asset Recovery</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Depan.	275
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	277
B. Saran	285
Daftar Pustaka	296
Riwayat Hidup	